

The Transparency Of Revenue Budget Report In 2017 At Waru Village, Karanganyar Regency, Central Java

Nurlia Farida¹, Dyah Mutiarin¹

¹Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Jl. Lingkar Barat, Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
55183, Telp: 0274-387656 Fax. 0274-387646 Email: Nurliafarida74@gmail.com

Waru village is administration area that needs the controlling of government to fulfil all aspects of building especially in the public development as *good governance* practice with transparency of all information which needed by public.

The study is to know how the transparency of Revenue Budget Report at Waru, Karanganyar, Central Java in 2017.

The study is descriptive analytic to know the transparency of Revenue Budget Report at Waru, Karanganyar Regency, Central Java in 2017. The primary data is the interview with head of Waru Village and secondary data are Revenue Budget Report at Waru, Karanganyar, Central Java in 2017 and the report of implementation of the Waru Village development program.

The Waru Government had not implemented transparency in the announcement of public development especially KarangTaruna, kindergarten and bridge. It also had not implemented transparency in the information of Revenue Budget Report in 2017 by web site and accommodation but it had reported the Revenue Budget Report in 2017 on time.

The Waru Government had implemented the transparency in the aspect of Revenue Budget Report in 2017 but it had not implemented the transparency in the announcement of public, the information of Revenue Budget Report in 2017 by web site and accommodation.

Key word: The Transparency, The Revenue Budget Report In 2017, Waru Village, Karanganyar, Central Java

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk yang terdiri dari berbagai lapisan di mana masing-masing lapisan tersebut berada pada tempat yang berbeda juga. Salah satu bagian masyarakat yang terkecil adalah

di daerah pedesaan di mana desa merupakan salah satu bagian dari pemerintahan administrasi negara Republik Indonesia yang paling kecil di mana desa perlu mendapatkan perhatian yang lebih dari pemerintah pusat hingga pemerintah desa. desa merupakan tempat bermukimnya suatu

golongan atau kelompok penduduk yang ditandai dengan adanya penggunaan tata bahasa dengan disertai logat kedaerahan yang kental, memiliki tingkat pendidikan relatif rendah dan pada umumnya warga masyarakatnya bermata pencaharian di bidang agraria atau kelautan. Daerah ini dihuni oleh sejumlah keluarga dengan sistem pemerintahan sendiri dan dikepalai oleh kepala desa.¹ Desa juga suatu kesatuan hukum dimana bermukim suatu masyarakat yang berkuasa dan masyarakat tersebut mengadakan pemerintahannya sendiri.²

Salah satu desa di kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah adalah desa Waru dimana desa ini merupakan salah satu desa administratif yang masih memerlukan perhatian dari pemerintah terkait dengan pemenuhan di semua sektor kehidupan. Disatu sisi, pemerintah Desa Waru memiliki kewajiban dalam mewujudkan atau menyelenggarakan sistem *good goverment* yang salah satunya adalah pengalokasian dana untuk program dan pelaksanaan pembangunan Desa Waru. Hal ini terkait dengan kondisi Desa Waru yang masih jauh dari kelayakan yakni pembangunan di bidang pembinaan kemasyarakatan terutama pada pengembangan kegiatan operasional Karang Taruna yang belum dijalankan sepenuhnya di mana kegiatan tersebut merupakan kegiatan utama bagi para pemuda Desa Waru dalam rangka mengembangkan Desa Waru.

Berdasarkan pengamatan peneliti, pembangunan jamban juga belum sepenuhnya terselenggara dengan baik dalam arti belum semua perdukahan di Desa Waru memiliki jamban. Selanjutnya peneliti juga melihat bahwa tidak semua perdukahan memiliki gedung sekolah untuk anak-anak terutama gedung TK. Pembangunan gedung TK adalah

pembangunan yang sangat penting untuk menunjang kegiatan belajar mengajar anak-anak di Desa Waru sebagai persiapan pendidikan sebelum memasuki pendidikan di Sekolah Dasar. Peneliti juga melihat bahwa pembangunan talud juga belum sepenuhnya terselenggara dengan baik di tiap perdukahan, hal ini berkaitan dengan keselamatan penduduk sehubungan dengan bencana banjir di daerah sekitar aliran Sungai Bengawan Solo akibat tidak adanya talud tersebut. Hal ini seharusnya menjadi perhatian khusus bagi pemerintah Desa Waru untuk segera merealisasikan pembangunan desa terkait dengan beberapa sektor tersebut. Di satu sisi, pemerintah Desa Waru dalam menyelenggarakan pembangunan di sektor-sektor tersebut harus terlebih dulu menyelenggarakan pendanaan desa terkait dengan program dan pelaksanaan untuk pembangunan Desa Waru yang selanjutnya tercipta Anggaran Pendapatan Belanja Desa Waru, Karanganyar, Jawa Tengah. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Waru, Karanganyar, Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa Waru tersebut meliputi pengadaan barang dan jasa yang diperlukan untuk pembangunan Desa Waru dimana pemerintah Desa Waru harus lebih memprioritaskan pemenuhan kebutuhan primer masyarakat desa yang dalam hal ini adalah pembangunan fisik berupa pembangunan talud dan jamban, menambah fasilitas pendidikan seperti gedung TK sehingga kebutuhan masyarakat akan tersebut dapat terpenuhi secara efektif dan efisien.

Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Waru tersebut harus memenuhi unsur perwujudan dari *good goverment* dimana *good goverment* merupakan prinsip dalam mengatur pemerintahan yang memungkinkan terjadinya layanan publiknya secara

efisien serta mampu menghasilkan sistem pengadilan yang bisa diandalkan serta mewujudkan administrasi yang bertanggungjawab pada publik.³ *Good governance* merupakan suatu mekanisme atau tahapan dari pengelolaan berdasarkan kewenangan tertinggi dari pemerintah dan menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyatakan bahwa *good governance* merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan terhadap publik atau masyarakat secara baik “*good*” and memenuhi unsur pelayanan “*service*” yang salah satunya diselenggarakan dengan menggunakan prinsip transparansi.⁴ Transparansi merupakan kewajiban bagi para pengelola dalam menjalankan prinsip keterbukaan untuk menciptakan keputusan serta penyampaian informasi. Keterbukaan dalam menyampaikan informasi tersebut juga mengandung arti bahwa informasi yang disampaikan harus lengkap, benar, dan tepat waktu terhadap semua pemangku kepentingan sehingga pemberi informasi tidak diperbolehkan untuk merahasiakan, menyembunyikan, menutupi serta menunda semua informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.⁵ Hal ini berarti bahwa pemerintah Desa Waru harus mewujudkan prinsip transparansi terkait Anggaran Pendapatan Belanja Desa kepada masyarakat Desa Waru dalam rangka merealisasikan tanggung jawabnya untuk memenuhi kewajibannya pada prinsip keterbukaan untuk menciptakan keputusan serta penyampaian informasi program pembangunan Desa Waru kepada masyarakat.

Di satu sisi, pemerintah Desa Waru juga belum mewujudkan isi undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 terkait dengan transparansi tentang pembangunan Desa Waru dalam menciptakan akses informasi

agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan desa di mana pemerintah desa Waru belum mengalokasikan program pembangunan desa sesuai yang tertera dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa Waru tahun 2017 pada masyarakat Desa Waru dalam pertemuan antar warga desa. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Transparansi Anggaran” yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa Waru 2017 dengan realisasinya di Desa Waru tersebut. Peneliti juga akan mengevaluasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi prinsip transparansi oleh pemerintah Desa Waru sehubungan dengan penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Waru 2017 tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “ Bagaimana transparansi Anggaran Pendapatan Belanja Desa Waru, Karanganyar, Jawa Tengah tahun 2017?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana transparansi anggaran pendapatan belanja Desa Waru, Karanganyar, Jawa Tengah tahun 2017.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai transparansi Anggaran Pendapatan Belanja Desa tahun 2017 dengan studi kasus transparansi dana pembangunan Desa Waru, Karanganyar, Jawa Tengah merujuk pada beberapa penelitian terdahulu yakni :

1. Penelitian oleh Fitriati (2017) dengan judul penelitian yakni *“Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Tempel Kecamatan Krian-Sidoarjo”*. Hasil penelitian tersebut adalah pengelolaan APBDes di desa Tempel Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo telah melaksanakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan APBDes tahun anggaran 2015. Terdapat suatu bukti fisik dan laporan dalam realisasi program APBDes pada tahun 2015, dan masyarakat juga bisa mengakses informasi berupa papan informasi yang disediakan dari desa Tempel.

2. Penelitian oleh Iqsan (2016) dengan judul penelitian yakni *“Transparansi Pemerintah Desa Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) di Desa Long Nah Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur”*. Hasil penelitian tersebut adalah penerapan prinsip transparansi oleh pemerintah desa dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Long Nah Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur sudah terlaksana dengan baik.

Hal ini dapat dilihat bagaimana pemerintah desa memenuhi transparansi mulai dari menyediakan pengumuman kebijakan anggaran desa, menyediakan dokumen anggaran dan mudah diakses oleh masyarakat, menyediakan laporan pertanggung jawaban yang tepat waktu, mengakomodir suara atau usulan masyarakat dan menyediakan sistem pemberian informasi kepada masyarakat desa.

3. Penelitian oleh I Wayan Irvan M (2017) dengan judul penelitian yakni *“Penerapan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan*

Dan Belanja Desa (Studi Kasus Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan)”. Hasil penelitian tersebut adalah pengelolaan Pendapatan dan Belanja Desa Anggaran di Desa Sidoharjo yang terdiri dari perencanaan, implementasi dan akuntabilitas telah sesuai dengan peraturan dan kebijakan kecuali pada pelaporan. Sedangkan penghambat penyusunan laporan adalah pada aspek Sumber daya manusia dan sumber pendanaan, dalam APBDesa program sehingga menjadi kendala adalah pencairan sumber pendanaan tidak sesuai dengan rencana sehingga sering terjadi keterlambatan dalam pelaporan dan akuntabilitas yang dibuat oleh aparat desa.

4. Penelitian oleh Arista Widiyanti (2016) dengan judul penelitian yakni *“Pasuruan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Sumberejo Dan Desa Kandung di Kecamatan Winongan Kabupaten)”*. Hasil penelitian tersebut adalah berdasarkan Permendagri 113 tahun 2014, menunjukkan bahwa secara garis besar pengelolaan alokasi dana desa di Desa Sumberejo sudah akuntabel dan transparan pada tahapan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawabannya di mana alokasi dana desa tersebut juga didukung oleh masyarakat dalam melakukan pembangunan desa. Sedangkan untuk Desa Kandung menunjukkan hasil yang tidak akuntabel dan transparan baik terhadap masyarakat maupun pihak internalnya sendiri.

5. Penelitian oleh Wienda Damayanti (2018) dengan judul penelitian yakni *“Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa”*. Hasil penelitian tersebut adalah pemerintah Desa Tegiri sudah transparan dan akuntabel pada tahap perencanaan, pelaksanaan,

penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Sedangkan untuk desa sumberagung menunjukkan hasil yang kurang transparan tetapi sudah akuntabel.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan sekumpulan teori yang disusun dalam bentuk konsep tertentu dan berisi tentang pernyataan yang teratur serta sistematis. Beberapa teori tersebut menjelaskan tentang hubungan antara dua atau lebih variabel untuk memahami permasalahan dalam latar belakang masalah. Beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

1. Keuangan Desa

Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan pemerintahan desa dan dapat dinilai dengan uang yang termasuk didalamnya adalah segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban dari desa tersebut.⁶ Pengelolaan keuangan desa, dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember melalui tim penyelenggara yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Bendahara dimana pengelolaan keuangan desa tersebut diselenggarakan dalam bentuk laporan keuangan dana desa. Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang diberikan oleh suatu lembaga pemerintah yang berisi tentang gambaran kondisi keuangan dari lembaga tersebut dalam upaya untuk menunjukkan gambaran mengenai tingkat kinerja di

bidang keuangannya dengan prinsip akuntabilitas untuk memberikan informasi keuangan.

2. Transparansi

Transparansi anggaran pemerintah desa yang baik terhadap masyarakat desa baik dari tingkat pusat maupun daerah harus diselenggarakan dalam rangka mewujudkan kebebasan aliran informasi yang tersedia dan dapat dimengerti.⁷ Hal ini berarti bahwa pemerintah Desa Waru pada saat menyelenggarakan transparansi anggaran pemerintah desa untuk pembangunan Desa Waru harus mengutamakan kebebasan aliran informasi yang tersedia dan dapat dimengerti oleh masyarakat Desa Waru yang merujuk pada kriteria transparansi anggaran yang dapat digunakan untuk mengukur transparansi dalam perencanaan maupun penganggaran yang meliputi terdapat pengumuman mengenai kebijakan program desa, tersedianya dokumen program desa yang mudah diakses, terakomodasinya suara atau usulan dari masyarakat tentang program desa, serta tersedia laporan pertanggungjawaban program desa yang tepat waktu.⁸

F. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan dari variabel penelitian yang telah dinyatakan dalam definisi konsep dimana selanjutnya akan digunakan sebagai obyek tolak ukur saat melakukan penelitian terhadap obyek yang akan diteliti. Sehingga

Definisi operasional penelitian merupakan penjelasan dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian terhadap indikator-indikator yang membentuknya.⁹ Indikator-indikator yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur transparansi penggunaan dana desa untuk pembangunan Desa Waru meliputi adanya pengumuman mengenai kebijakan program desa, dokumen program desa yang mudah diakses, akomodasinya suara atau usulan dari masyarakat tentang program desa serta laporan pertanggungjawaban program desa yang tepat waktu.

G. Jenis Penelitian

Penelitian mengenai analisis transparansi laporan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) tahun 2017 merupakan penelitian “deskriptif analitik” yaitu penelitian yang mencoba menggali bagaimana dan mengapa fenomena suatu obyek itu terjadi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *cross-sectional* dimana penelitian ini dengan melakukan pengukuran atau pengamatan pada saat bersamaan (sekali waktu) antara variabel independen dan variabel dependen.¹⁰ Hal ini berarti bahwa peneliti mengambil penelitian tentang penyelenggaraan sistem transparansi pada program pembangunan desa Waru, Karanganyar, Jawa Tengah akan menggali sejauh mana prinsip transparansi pemerintah Desa Waru dalam menyelenggarakan program pembangunan desa dengan prinsip transparansi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku yakni Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah.

H. Jenis dan Sumber Data

Untuk mendapatkan data yang akurat diperlukan suatu alat ukur atau yang disebut instrument yang baik. Alat ukur atau instrument yang baik adalah alat ukur/instrument yang valid dan reliable.¹¹ Pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi data primer yakni wawancara dengan kepala Desa Waru, Karanganyar, Jawa Tengah terkait dengan adanya pengumuman mengenai kebijakan program desa, dokumen program desa yang mudah diakses, akomodasinya suara atau usulan dari masyarakat tentang program desa serta laporan pertanggungjawaban program desa yang tepat waktu. Peneliti juga menggunakan data sekunder yakni APBDes 2017 dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun 2017.

I. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data dalam penelitian ini meliputi pengidentifikasian data, pengelompokan data, dan pengambilan keputusan.

J. Hasil

1. Pengumuman Mengenai Kebijakan Program Pembangunan Desa Waru

Pengumuman mengenai kebijakan program pembangunan Desa Waru dianalisis berdasarkan beberapa program yang dijanjikan oleh pemerintah Desa Waru pada awal tahun 2017 yakni pembangunan di bidang pembinaan kemasyarakatan terutama pada pengembangan kegiatan operasional Karang Taruna, pembangunan jamban

di sebagian perdukahan, pembangunan gedung TK, dan pembangunan talud.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Waru, dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa Waru yang dalam hal ini adalah Kepala Desa Waru telah mengumumkan semua program pembangunan Desa Waru yakni pembangunan di bidang pembinaan kemasyarakatan terutama pada pengembangan kegiatan operasional Karang Taruna, pembangunan jamban di sebagian perdukahan, pembangunan gedung TK, dan pembangunan talud pada awal tahun 2017.

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat Desa Waru, dapat disimpulkan bahwa semua program pembangunan Desa Waru yang telah diumumkan oleh Kepala Desa Waru pada awal 2017 yang meliputi pembangunan di bidang pembinaan kemasyarakatan terutama pada pengembangan kegiatan operasional Karang Taruna, pembangunan jamban di sebagian perdukahan, pembangunan gedung TK, dan pembangunan talud belum diselenggarakan hingga akhir 2017.

2. Dokumen Program Desa Yang Mudah Diakses Masyarakat Desa Waru

Indikator dokumen program Desa Waru yang mudah diakses oleh masyarakat Desa Waru dianalisis berdasarkan alamat web site yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa Waru bagi masyarakat desa dan

khalayak atau publik untuk mengakses berbagai kegiatan pembangunan Desa Waru dengan alamat web site yakni <http://waru-kebakkramat.sedeka.id>. Alamat tersebut memuat informasi mengenai beranda, profil desa, kabar desa, produk, potensi, kependudukan, data desa dan program-program pembangunan desa Waru yang dilaporkan oleh pemerintah Desa Waru pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa tahun 2017.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Waru, dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa Waru yang dalam hal ini adalah Kepala Desa Waru telah menginformasikan segala pelaksanaan keadministrasian dan pembangunan fisik desa pada masyarakat desa Waru melalui alamat web site yakni <http://waru-kebakkramat.sedeka.id>.

Selanjutnya peneliti dalam menganalisis tentang indikator dokumen program Desa Waru yang mudah diakses oleh masyarakat Desa Waru juga mendasarkan pada wawancara terhadap ketua RT Bapak Broto terkait akses dokumen pembangunan Desa Waru oleh masyarakat dengan hasil bahwa semua program pembangunan Desa Waru sebagaimana yang terperinci dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa tahun 2017 tidak dapat diakses secara keseluruhan dan terperinci melalui alamat web site yang diberikan oleh pemerintah Desa Waru yakni <http://waru-kebakkramat.sedeka.id>.

3. Akomodasi Atau Usulan Masyarakat Desa Waru Tentang Pembangunan Desa.

Indikator akomodasi atau usulan masyarakat Desa Waru tentang pembangunan desa dianalisis berdasarkan wawancara dengan ketua RT yakni Bapak Broto terkait dengan peran masyarakat Desa Waru dalam pelaksanaan pembangunan Desa Waru yang menyatakan bahwa pemerintah Desa Waru belum melibatkan peran serta dari warga dalam mencanangkan program pembangunan di bidang pembinaan kemasyarakatan terutama pada pengembangan kegiatan operasional Karang Taruna, pembangunan jamban di sebagian perdukahan, pembangunan gedung TK, dan pembangunan talud sehingga menimbulkan ketidakpastian dari terselenggaranya program tersebut. Berdasarkan wawancara dengan ketua RT Desa Waru dan paparan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Waru Tahun 2017, dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa Waru belum melaksanakan prinsip transparansi terkait dengan adanya akomodasi atau usulan masyarakat Desa Waru tentang pembangunan Desa Waru.

4. Laporan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Waru Tahun 2017 Yang Tepat Waktu

Indikator laporan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Waru Tahun 2017 yang tepat waktu dianalisis berdasarkan dokumen Anggaran

Pendapatan Belanja Desa Waru Tahun 2017 yang meliputi rincian program-program pembangunan Desa Waru pada sektor fisik prasarana, penanggulangan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, agama, pemuda dan seni budaya, keamanan dan ketertiban, pertanian, usaha kecil dan menengah serta koperasi, sosial dan lingkungan hidup di mana semua program tersebut juga dilaporkan tentang anggaran pada tiap-tiap sektor. keadministrasian desa.

Peneliti dalam menganalisis indikator laporan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Waru Tahun 2017 yang tepat waktu juga berdasarkan wawancara dengan Kepala desa Waru yang menyatakan bahwa pemerintah Desa Waru telah menjalankan prinsip transparansi dalam melaksanakan laporan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Waru tahun 2017 yakni laporan tersebut telah selesai pada akhir tahun 2017. Laporan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Waru, mendasarkan pada laporan anggota pejabat desa terkait dengan penggunaan anggaran pembangunan desa Waru sesuai dengan program pembangunan Desa Waru yang berasal dari alokasi dana desa Pemerintah Kabupaten Karanganyar serta melaporkan Anggaran Pendapatan Belanja Desa tahun 2017 yang telah disusun oleh sekretaris desa pada pemerintah kabupaten Karanganyar sebagai bahan pertanggungjawaban secara administratif terkait dengan klarifikasi pelaksanaan program pembangunan desa Waru beserta anggarannya.

K. Kesimpulan

Penelitian tentang transparansi Anggaran Pendapatan Belanja Desa tahun 2017 (studi kasus: alokasi dana pembangunan Desa Waru Kecamatan

Kebakkramat, Karanganyar, Jawa Tengah) menghasilkan beberapa kesimpulan yakni:

1. Pemerintah Desa Waru belum memenuhi prinsip transparansi terkait dengan tidak adanya pengumuman tentang pembangunan di bidang pembinaan kemasyarakatan terutama pada pengembangan kegiatan operasional Karang Taruna, pembangunan jamban di sebagian perdukahan, pembangunan gedung TK, dan pembangunan talud terhadap masyarakat Desa Waru.
2. Informasi tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Waru pada tahun 2017 tentang program berbagai program pembangunan desa beserta perincian anggarannya melalui alamat web site yakni <http://waru-kebakkramat.sedeka.id> belum bisa diakses secara menyeluruh oleh publik terkait dengan data desa, profil desa, produk desa, kependudukan, dan kegiatan desa sehingga pemerintah Desa Waru belum memenuhi prinsip transparansi.
3. Pemerintah Desa Waru dalam menyusun laporan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Waru Tahun 2017 secara tepat waktu telah memenuhi prinsip transparansi yang meliputi beberapa tahapan yakni mengadakan rapat koordinasi antar pengurus yang meliputi sekretaris desa, ketua LPMD, aparatur desa, BKM, LPM unsur perempuan, unsur P3A, dan unsur gapoktan kemudian menyusun laporan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Waru oleh sekretaris desa yang selanjutnya melakukan pelaporan pada pemerintah

kecamatan yang pada akhirnya juga dilaporkan pada pemerintah Kabupaten Karanganyar pada akhir tahun 2017.

4. Pemerintah Desa Waru belum melaksanakan prinsip transparansi terkait dengan tidak adanya penyelenggara akomodasi atau usulan masyarakat Desa Waru tentang pembangunan Desa Waru.

L. Daftar Pustaka

1. Poerwadarminta. 2007. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : PN Balai Pustaka
2. Kartohadikusumo, Soetardjo. 2016. *Desa*. Yogyakarta: Sumur Bandung
3. Mas'ued, Mochtar. 2003. *Ekonomi-Politik Internasional dan Pembangunan*. Yogyakarta :Pustaka Pelajar
4. Harjanto, S.L. 2013. *Dinamika Birokrasi dan Politik Lokal*. PSPJ. Bekasi.
5. Agoes, Cenic Ardana 2009. *Etika Bisnis dan Profesi*. Jakarta :Salemba Empat
6. Abdillah. T., dan Tuloli. M.S. 2014, *Rancang Bangun Aplikasi Kontrol Pengelolaan Keuangan Desa*. Universitas Negeri Gorontalo
7. Fahmi, Irahman .2011. *Analisis Laporan Keuangan*. Bandung, Alfabeta
8. Mardiasmo. 2003. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta, Andi
9. Sugiono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung, Alfabeta
10. Nursalam. 2011. *Konsep dan Penerapan Metodologi*

Penelitian Ilmu Keperawatan.

Jakarta, Salemba Medika

11. Suprihatini. Amin, 2007,
Pemerintahan Desa dan
Keluraha, Klaten: Cempaka
Putih